



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANTUAN UNTUK BIAYA
OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) terhadap kesehatan anak dan ibu hamil di tingkat Desa / Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan untuk biaya operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk teknis untuk pemberian bantuan hibah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANTUAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan untuk Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

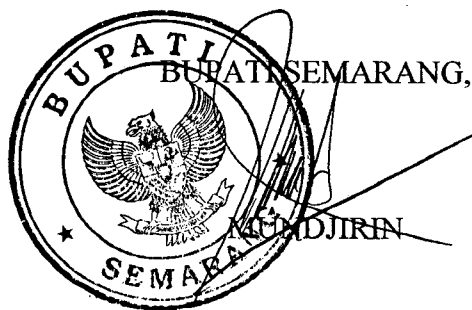
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 08 - 02 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 09 - 02 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 13

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANTUAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta merupakan lini terdepan dari deteksi dini di bidang kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Namun dalam perjalanannya Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) mengalami permasalahan yang cukup berat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat terutama pelayanan kesehatan untuk bayi dan ibu hamil. Permasalahan tersebut akibat dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga berakibat pula pada kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) banyak yang keluar sehingga mempengaruhi pelayanan kesehatan dan menurunnya strata Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan kinerja atau semangat kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan belanja hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan untuk biaya operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

Agar pengelolaan, pemberian dan pemanfaatan bantuan hibah tersebut dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan petunjuk teknis untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan petunjuk teknis pemberian bantuan ini adalah
 - a) Sebagai pedoman penggunaan belanja bantuan hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan untuk biaya operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
 - b) Alat pengendali, pengawasan dan tanggungjawab;
 - c) Menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d) Meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e) Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan ini adalah
 - a) Mendukung biaya operasional kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
 - b) Mendukung sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
 - c) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah seluruh Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Bawah Lima Tahun (BALITA) di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis belanja bantuan adalah belanja bantuan hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan untuk biaya operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Bawah Lima Tahun (BALITA) di Desa / Kelurahan di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2011.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran bantuan hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan untuk biaya operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan untuk biaya operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 dipergunakan untuk biaya operasional dalam rangka menunjang kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU).

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

A. Merupakan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Bawah Lima Tahun (BALITA) di Kabupaten Semarang;

B. Merupakan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang aktif dalam melakukan pelayanan kesehatan khususnya kepada ibu hamil dan anak bawah lima tahun (BALITA);

C. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) sebagaimana dimaksud dalam huruf A, sanggup dan bersedia mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

D. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) sebagaimana dimaksud dalam huruf A, diusulkan oleh Kepala Desa / Lurah lewat Camat dan ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan surat permohonan bantuan yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dengan melampirkan laporan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) tahun sebelumnya dan susunan kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang bersangkutan.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Seleksi calon penerima bantuan didasarkan pada hasil dari usulan calon penerima bantuan oleh Camat yang telah memenuhi kriteria penerima bantuan dan kelengkapan dari surat permohonan bantuan yang diajukan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan hasil seleksi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang;
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan penerima dan besaran bantuan dalam Keputusan Bupati Semarang.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan diberikan melalui Bendahara Desa / Kelurahan yang telah membuka rekening di Bank Jateng Cabang Ungaran;
2. Bantuan hibah dimaksud ditransfer ke kas Desa / Kelurahan melalui Nomor Rekening pada Bank Jateng Cabang Ungaran atas nama Bendahara Desa / Kelurahan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Semarang;
3. Bendahara Desa / Kelurahan menandatangani Berita Acara Penerimaan bantuan dan Kwitansi di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah;
4. Selanjutnya Bendahara Desa / Kelurahan membuat tanda terima (kwitansi) penyerahan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang ditandatangani oleh Ketua Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU).

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima, Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) penerima bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan yang telah diketahui oleh Kepala Desa / Lurah kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. Bukti penggunaan uang bantuan berupa kwitansi;
 - b. Bukti tanda terima;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah;
 - d. Berita Acara Hibah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inpektorat Kabupaten Semarang.

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III huruf A kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan untuk Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai acuan atau dasar atau pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

